

RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN ANGGARAN 2022



DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN PASAMAN BARAT 2022



Kata Pengantar

Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat sebagai salah satu unit eselon II berkewajiban menyusun Rencana Kerja dalam rangka mendukung terselenggaranya tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance). Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasaman Barat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat. Renja disusun untuk satu tahun yang memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan Ketenagakerjaan, strategis, program, kegiatan pencapaian Renstra, dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Dengan melaksanakan perencanaan kinerja yang jelas dan terukur diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan dan akuntabel bagi semua pihak mengenai kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat. Kami mengharapkan adanya masukan-masukan dari semua pihak untuk memperbaiki kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat dimasa mendatang.

Simpang Empat, 6 Agustus 2021

Plt. Kepala,



ARMEN,SH
Pembina Utama Muda / IV.c
Nip. 19690808 198903 1 002



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i	
Daftar Isi.....	ii	
BAB I PENDAHULUAN		
1.1. Latar Belakang	1	
1.2. Landasan Hukum.....	2	
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5	
1.4. Sistematika Penulisan.....	6	
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DISNAKER	9	
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	12	
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	13	
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	14	
2.5. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	32	
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH		
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	33	
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD	34	
3.3. Program dan Kegiatan	35	
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ..		36
BAB V. PENUTUP.....		50



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS TENAGA KERJA

Jl. Soekarno-Hatta Simpang Empat Telp./Fax. (0753) 466400

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2021

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra OPD adalah dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode jangka menengah daerah;
- b. Bahwa Rencana Kerja (Renja) OPD memuat program dan kegiatan yang mendukung visi, misi, tujuan, strategi, dan kebijakan Pemerintah Daerah dan disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra OPD;
- c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b maka Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
19. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 44 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.
20. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
24. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang

- Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2030;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031;
31. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/195/Bup-Pasbar/2017 tentang Pengesahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat;
32. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :**
- (1) Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Dinas Tenaga Kerja untuk periode 1 (satu) tahun yakni Tahun Anggaran 2022;
 - (2) Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat pada Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA :** Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022 ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 6 Agustus 2021

**Pt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN PASAMAN BARAT**


ARMEN, SH
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19690808 198903 1 002



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses dan upaya untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dari kondisi saat ini. Agar pembangunan mencapai hasil yang diinginkan diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang matang dan terpadu, mencakup semua aspek yang terkait dengan perencanaan itu sendiri. Perencanaan pembangunan daerah peranannya semakin penting dalam memetakan potensi yang ada secara optimal tanpa mengabaikan kelestarian alam dan lingkungan, sehingga strategi yang dirumuskan melalui implementasi sistem perencanaan dapat dilakukan secara komprehensif dan sistematis.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsif sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja (Renja) OPD merupakan pedoman kerja bagi DISNAKER selama 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan sebagaimana tertuang dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja mempunyai kedudukan yang strategis dalam menjembatani perencanaan pada DISNAKER dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Pasaman Barat Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) DISNAKER Kab. Pasaman Barat Tahun 2021-2026 dan menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan OPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renja juga merupakan bentuk jaminan terhadap



keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan dan menjadi salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD untuk mengetahui capaian kinerja sebagaimana tercantum pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) DISNAKER.

Renja DISNAKER Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 berisi dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam kerangka regulasi dan anggaran untuk periode 1 (satu) tahun kedepan yang bersifat teknis operasional dan kuantitatif bagi pelaksanaan pembangunan daerah di Kab. Pasaman Barat. Renja DISNAKER Tahun 2022 memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 dan tahun berjalan, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2022. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendukung pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di bidang perencanaan pembangunan daerah, DISNAKER mempunyai tugas yang sangat strategis antara lain, perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan.

Rencana Kerja Disnaker Kab. Pasaman Barat disusun secara terpadu, partisipatif, demokratis yang dihasilkan melalui proses pemikiran strategis dalam menyikapi isu-isu yang berkembang untuk kemudian diimplementasikan dalam program dan kegiatan OPD. Pada tahapan selanjutnya Rencana Kerja digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Pasaman Barat tahun 2022. Kualitas dokumen Rencana Kerja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, serta kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan serta mengevaluasi rencana yang telah disusun.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Disnaker Kabupaten Pasaman Barat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut.

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2030;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011 – 2031;



22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Organisasi Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
25. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 44 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja DISNAKER Kabupaten Pasaman Barat disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan 1 (satu) tahunan yang memuat program dan kegiatan terukur sebagai dasar untuk penilaian kinerja DISNAKER serta sebagai perangkat untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang terintegrasi pada Tahun 2022.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) DISNAKER Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan selama periode 1 (satu) tahun;
2. Mengoptimalkan fungsi perencanaan pembangunan daerah di setiap bidang, baik Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja maupun Bidang Hubungan Industrial dan Transmigrasi.
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, responsif, partisipatif, efektif, efisien, dan berkelanjutan
4. Menyediakan informasi dan gambaran pelaksanaan fungsi serta tolok ukur kinerja Disnaker Kab. Pasaman Barat.
5. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat sebagai upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah.



1.4. Sistematika Penulisan

Mengingat arti strategis Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Disnaker Tahun 2022 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, memuat ketentuan antara lain:

- 1) Memuat program, kegiatan lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD;
- 2) Berpedoman pada Renstra OPD dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja;
- 3) Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun pada rancangan awal Renja adalah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra;
- 4) Program dan Kegiatan dalam RENJA harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD serta disusun selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang;
- 5) Renja disajikan paling sedikit memuat pendahuluan; hasil evaluasi Renja tahun lalu; tujuan dan sasaran; rencana kerja dan pendanaan; dan penutup.
- 6) Dokumen Renja akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD dan dan menjadi rancangan RKPD Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat diuraikan berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:



BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 *Latar Belakang*, Menguraikan gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Tenaga Kerja, pengertian ringkas tentang Renja Dinas Tenaga Kerja, proses penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja, keterkaitan antara Renja Dinas Tenaga Kerja dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Tenaga Kerja, dengan Renja K/L dan Renja provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2 *Landasan Hukum*, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.
- 1.3 *Maksud dan Tujuan*, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja.
- 1.4 *Sistematika Penulisan*, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Tenaga Kerja, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2021

- 2.1 *Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD*, Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2 *Analisis Kinerja Pelayanan OPD*, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
- 2.3 *Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja*, memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan hal kritis yang terkait; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional; tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.
- 2.4 *Review terhadap Rancangan Awal RKPD*, Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut.



- 2.5 *Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat*, menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari masyarakat, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan pelaksanaan musrenbang.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 *Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi*, memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja.

- 3.2 *Tujuan dan sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja*, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Tenaga Kerja.

- 3.3 *Program dan Kegiatan*, memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

Memuat Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tidak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DISNAKER Tahun Lalu dan Capaian Renstra DISNAKER

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja OPD bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja OPD yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD. Melalui evaluasi akan diketahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan.

Pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Tenaga Kerja melaksanakan 5 (Lima) Program yang dijabarkan kedalam 14 (Empat belas) Kegiatan dan 31 (Tiga Puluh Satu) Sub Kegiatan. Evaluasi pelaksanaan Renja DISNAKER tahun 2021 memuat pencapaian target kinerja tahun 2021 berdasarkan rencana kerja sebagaimana telah disusun. Selain itu, evaluasi pelaksanaan Renja DISNAKER tahun 2021 juga memuat perkiraan capaian kinerja pada tahun tersebut, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra DISNAKER pada tahun-tahun sebelumnya.

Adapun informasi yang akan didapatkan melalui evaluasi pelaksanaan Renstra DISNAKER sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi/melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.



Penyebab tidak terpenuhinya pencapaian target OPD antara lain misalnya:

1. Terlambatnya pengesahan anggaran.
2. Realisasi alokasi anggaran lebih kecil dari APBD yang ditetapkan.
3. Kenaikan indeks harga satuan barang.
4. Atau faktor lainnya.

Hasil evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja DISNAKER pada tahun 2021 serta perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (TA 2021) disajikan pada Tabel 2.1 dibawah ini:



Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022

Tabel 2.1.a
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan
Pencapaian Renstra OPD s.d. Tahun 2021
Kabupaten Pasaman Barat

Nama OPD : DISNAKER Pasaman Barat										
No.	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) th 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s.d. Tahun 2021	
					Target Renja OPD Tahun 2020	Realisasi Renja OPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
1	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang diserap disektor Formal	33,15 %	30,47%	32,65%	30,47%	30,47%	33,15 %	33,15 %	33,15 %
		Persentase Tenaga Kerja yang diserap disektor Informal	70,40 %	69,53%	69,90 %	69,53%	69,53%	70,40 %	70,40 %	70,40 %
2	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Jumlah Tenaga Kerja yang menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan	20.342	17.562	19.225	17.562	91,35%	20.342	20.342	20.342
3	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Ditetapkan	1	1	1	1	100%	1	1	1
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pada penjabaran RPJMD tahun 2021-2026, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat mendukung pencapaian Misi Ke-4 yaitu Menanggulangi kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan dasar, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan ekonomi kreatif. Kemudian Misi ini mempunyai tujuan untuk Meningkatkan penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan ketertinggalan daerah berbasis pemberdayaan dan peningkatan kualitas lingkungan sementara sasarannya adalah menurunnya tingkat pengangguran dengan strategi dan arah kebijakannya perluasan kesempatan kerja dan perlindungan terhadap tenaga kerja.

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase Pencaker yang di tempatkan		36%	38%	40%	40%	N/A		38%	40%	
2	Persentase Pencaker yang bersertifikat		2,64%	15,86%	15,86%	15,86%	N/A	13,28%	15,86%	15,86%	
3	Jumlah Pencaker yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan		17,450	19,225	20,342	20,342	17.551	21.715	19,225	20,342	
4	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang di selesaikan		100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Jumlah kawasan Transmigrasi yang di tetapkan		1	1	1	1	N/A	1	1	1	



2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Sesuai dengan prioritas nasional yang berjumlah 7 (Tujuh) buah, maka program prioritas kementerian tenaga kerja masuk ke dalam prioritas nasional pertama yaitu Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan. Kemudian prioritas nasional yang ketiga yaitu SDM Berkualitas dan Berdaya Saing

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya, Disnaker Kabupaten Pasaman Barat dihadapkan pada sejumlah isu-isu penting yang berimplikasi terhadap penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah. Adapun isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian adalah :

1. Memperkuat daya saing tenaga kerja dalam memasuki pasar tenaga kerja global
2. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan
3. Meningkatkan akses angkatan kerja kepada sumber daya produktif yang dilaksanakan
4. Pelaksanaan sistem Jaminan sosial nasional
5. Jaminan sosial bagi pekerja penerima upah
6. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan penempatan yang dilaksanakan

Sedangkan Sasaran besar lainnya yang hendak dicapai dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 adalah :

1. Meningkatkan jumlah tenaga profesional yang berkeahlian
2. Tersedianya program perlindungan sosial bagi pekerja
3. Tersedianya kebijakan pengupahan sebagai payung hukum
4. Terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara serikat pekerja dengan pengusaha
5. Tersedianya informasi pasar tenaga kerja yang efektif untuk menghubungkan antara pencari kerja dengan industri
6. Terciptanya lingkungan kerja yang aman dan sehat



2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat membutuhkan pagu anggaran sebesar **Rp. 4.228.638.311,-** (*Empat juta dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus sebelas rupiah*) untuk pencapaian target kinerja pada tahun 2022. Pagu dana tersebut diproyeksikan untuk mendukung pelaksanaan -- kegiatan dari 6 program, 16 kegiatan dan 34 sub kegiatan yang akan direncanakan.

Berdasarkan analisis kebutuhan, rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2022 untuk Disnaker Kabupaten Pasaman Barat disajikan pada tabel berikut:



Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022

Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2022
Hasil Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Kabupaten Pasaman Barat

Nama OPD: DISNAKER Kabupaten Pasaman Barat

Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Sumber Dana
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
Belanja Operasional				DISNAKER				4,218,638,311.00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA								
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhinya Kegiatan Penunjang Operasional Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	Persentase Realisasi Keuangan	DISNAKER	100 persen	26 Orang	100 persen	2,598,790,888.00
								DAU



Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Terpenuhi Kegiatan Penunjang Operasional Perangkat Daerah	Jumlah Non PNS (PTT/THL) Penunjang Administrasi Perkantoran	Persentase Realisasi Keuangan	DISNAKER	100 persen	14 Orang	100 persen	252,500,000.00	DAU
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Terpenuhi Kegiatan Penunjang Operasional Perangkat Daerah	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	Persentase Realisasi Keuangan	DISNAKER	100 persen	12 Bulan	100 persen	64,920,000.00	DAU
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah									
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Terpenuhi Kegiatan Penunjang Operasional Perangkat Daerah	Jumlah uang makan petugas piket malam Non PNS(THL) yang melaksanakan pengamanan BMD pada DISNAKER	Jumlah uang makan petugas piket malam yang dibayarkan	DISNAKER	100 persen	1 Orang	100 persen	6,480,000.00	DAU
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Terpenuhi Kegiatan Penunjang Operasional Perangkat Daerah	Jumlah ASN Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang di kelola Disnaker	DISNAKER	100 persen	1 Orang	100 persen	9,600,000.00	DAU



Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								30,000,000.00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Persentase Terpenuhi Kegiatan Penunjang Operasional Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan (PIM)	DISNAKER	100 persen	2 Orang	100 persen	DAU	-
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase Terpenuhi Kegiatan Penunjang Operasional Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan	DISNAKER	100 persen	10 Orang	100 persen	DAU	-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase Terpenuhi Kegiatan Penunjang Operasional Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas Pegawai	DISNAKER	100 persen	2 Orang	100 persen	DAU	30,000,000.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah								182,830,978.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terpenuhi Kegiatan Penunjang Operasional Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik bangunan Kantor	DISNAKER	100 persen	1 Paket	100 persen	DAU	6,999,738



Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022

Daerah									
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terpenuhi Kegiatan Penunjang Operasional Perangkat Daerah	Jumlah ATK yang dibutuhkan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	DISNAKER	100 persen	1 Paket	100 persen	57,468,900	DAU
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Terpenuhi Kegiatan Penunjang Operasional Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	DISNAKER	100 persen	1 Paket	100 persen	8,459,550	DAU
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terpenuhi Kegiatan Penunjang Operasional Perangkat Daerah	Jumlah Barang cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	DISNAKER	100 persen	1 Paket	100 persen	23,513,500	DAU



Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terpenuhi Kegiatan Penunjang Operasional Perangkat Daerah	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah yang diikuti	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	DISNAKER	100 persen	30 Kali	100 persen	86,389,290,00	DAU
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
Pengadaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Persentase Terpenuhi Kegiatan Penunjang Operasional Perangkat Daerah	Tersedianya Sarana Pendukung BLK	Persentase Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 persen	1 Paket	80 persen	91,280,000	DAU
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terpenuhi Kegiatan Penunjang Operasional Perangkat Daerah	Jumlah lembur PNS dan Non PNS penunjang urusan kantor	Cakupan Pemenuhan Penyediaan Jasa Pelayanan Penunjang Urusan Kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Bulan	80 persen	16,402,000	DAU
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terpenuhi Kegiatan Penunjang Operasional Perangkat Daerah	Jumlah Pembayaran Tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pemenuhan Penyediaan Jasa Pelayanan Penunjang Urusan Kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Bulan	80 persen	61,433,495	DAU



Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022

Daerah	Kelurahan						
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase Terpenuhi Kegiatan Penunjang Operasional Perangkat Daerah	Jumlah Gedung kantor yang disewa	Cakupan Pemenuhan Penyediaan Jasa Pelayanan Penunjang Urusan Kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Gedung	80 persen
						1,000.00	DAU
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terpenuhi Kegiatan Penunjang Operasional Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Cakupan Pemenuhan Penyediaan Jasa Pelayanan Penunjang Urusan Kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	2 Orang	80 persen
						4,800,000	DAU
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							67,782,800



Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terpenuhi Kegiatan Penunjang Operasional Perangkat Daerah	1. Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pembayaran pajak dan KIR. 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang Terpelihara	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	4 Unit	21 Unit	33,097,800	DAU
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Persentase Terpenuhi Kegiatan Penunjang Operasional Perangkat Daerah	1. Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pembayaran pajak dan KIR. 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang Terpelihara	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	2 Unit	21 Unit	24,075,000	DAU
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Persentase Terpenuhi Kegiatan Penunjang Operasional Perangkat Daerah	Jumlah alat elektronik penunjang operasional administrasi perkantoran yang dipelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang Terpelihara	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	15 Unit	21 Unit	10,610,000	DAU
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA									50,000,000.00



Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022

Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)								50,000,000.00
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Persentase Rencana Tenaga Kerja Yang Disusun	Jumlah Kegiatan Tenaga Kerja Makro	Jumlah Rencana Tenaga Kerja Yang Disusun	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Dokumen	2 Dokumen	50,000,000.00
DAU								
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Persentase Rencana Tenaga Kerja Yang Disusun	Jumlah Kegiatan Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Rencana Tenaga Kerja Yang Disusun	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Dokumen	2 Dokumen	-
DAU								
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI								10,000,000.00
Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian								10,000,000.00
Penguatan SDM dalam Rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Persentase jumlah warga transmigrasi yang mendapatkan pelatihan penguatan SDM	Jumlah warga transmigrasi yang diberikan pelatihan penguatan SDM	Jumlah Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kawasan	20 Orang	1 Kawasan	10,000,000.00
DAU								
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								490,003,000.00
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi								430,001,000.00



Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022

Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan kerja dan pembinaan Lembaga pelatihan kerja swasta	Jumlah Pelatihan yang difasilitasi	Jumlah Pelatihan yang difasilitasi	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Paket	3 Paket	430,000,000.00	DAU
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase Peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan kerja dan pembinaan Lembaga pelatihan kerja swasta	Terselenggaranya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja berupa penguatan dan pemberdayaan SDC serta pengadaan sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Jumlah pelatihan yang difasilitasi	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Dokumen	3 Paket	1,000.00	DAU
Pengadaan sarana pelatihan kerja Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan kerja	Jumlah sarana pelatihan kerja yang tersedia	Jumlah pelatihan yang difasilitasi	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua	100 persen	1 Paket	3 Paket	0.00	



Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022

dan pembinaan Lembaga pelatihan kerja swasta	Kelurahan					
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta						
Persentase peningkatan produktifitas tenaga kerja melalui pelatihan kerja dan pembinaan Lembaga pelatihan kerja swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja swasta yang melakukan Pembinaan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	9 LPK	9 LPK	1,000.00
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja swasta yang melakukan Pembinaan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	9 LPK	9 LPK	1,000.00
Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja						
Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang mendapatkan perizinan terintegrasi	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 LPK	9 LPK	9 LPK	25,000,000.00
Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil						
1,000.00						



Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022

Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah konsultasi produktivitas yang dilakukan pada perusahaan kec	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Konsultasi	6 Konsultasi	6 Konsultasi	1,000.00	DAU
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah dokumen pengukuran produktivitas Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja yang diukur	Jumlah Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja yang diukur	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	35,000,000.00	DAU
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA									
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota									
Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Persentase tenaga kerja yang terdaftar dan ditempatkan	Tersedianya Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan Disektor Formal dan Informal	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 persen	12 Bulan	84 Orang	0.00	DAU
Pelayanan antar Kerja	Persentase tenaga kerja yang terdaftar	Jumlah Pelayanan AKL, AKAD dan AKAN	Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan Disektor	Kab. Pasaman Barat, Semua	60 persen	12 Orang	84 Orang	10,000,000.00	DAU



Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022

	dan ditempatkan		Formal dan Informal	Kecamatan, Semua Kelurahan					
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Persentase tenaga kerja yang terdaftar dan ditempatkan	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan Disektor Formal dan Informal	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 persen	50 Orang	84 Orang	25,000,000.00	DAU
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Persentase tenaga kerja yang terdaftar dan ditempatkan	Jumlah Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan yang Diselenggarakan	Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan Disektor Formal dan Informal	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 persen	2 Orang	84 Orang	1,000.00	DAU
Perluasan kesempatan kerja	Persentase tenaga kerja yang terdaftar dan ditempatkan	Jumlah Pelayanan TKM, TTG, Pelayanan Padat Karya Infrastruktur, Pelayanan Padat Karya Produktif	Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan Disektor Formal dan Informal	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 persen	1 Paket	84 Orang	15,000,000.00	DAU
Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									0.00



Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022

Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Persentase Jumlah Perizinan LPTKS yang terintegrasi dan pengawasan Pengendalian LPTKS	Jumlah Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah LPTKS yang mendapatkan Perizinan yang Terintegrasi dan Pengawasan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	0 LPK	0 LPK	0.00	DAU
Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Persentase pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	0 LPK	0 LPK	0.00	DAU
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja									
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Persentase Tenaga Kerja yang terdaftar dan ditempatkan	Jumlah Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online yang Terpelihara	Jumlah Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online yang Terpelihara	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 persen	1 Aplikasi	1 Aplikasi	10,000,000.00	DAU
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Persentase Tenaga Kerja yang terdaftar dan ditempatkan	Jumlah laporan pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	Jumlah Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online yang Terpelihara	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 persen	12 Dokumen	1 Aplikasi	50,000,000.00	DAU



Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022

Job Fair/Bursa Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang terdaftar dan ditempatkan	Jumlah Bursa Kerja yang Dilaksanakan	Jumlah Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online yang Terpelihara	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 persen	2 Paket	1 Aplikasi	0.00	DAU
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota									
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Persentase perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan)	Jumlah Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terampil pada bidangnya	Jumlah Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terampil pada bidangnya	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	10 Orang	10 Orang	50,000,000.00	DAU
Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Persentase perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan)	Jumlah Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran yang tersedia	Jumlah Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terampil pada bidangnya	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	0 Paket	10 Orang	0.00	DAU
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna	Persentase perlindungan PMI (Pra dan Purna)	Jumlah Pekerja Migran Indonesia yang melakukan	Jumlah Perlindungan dan Kompetensi Calon	Kab. Pasaman Barat,	100 persen	0 Orang	10 Orang	0.00	DAU



Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022

Penempatan	Penempatan)	Pemberdayaan Purna Penempatan	Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terampil pada bidangnya	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL								
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Persentase perusahaan yang memenuhi sarana Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang melakukan pengesahan Peraturan Perusahaan	Jumlah Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 persen	5 Perusahaan	40 Perusahaan	DAU
Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Persentase perusahaan yang memenuhi sarana Hubungan Industrial	Jumlah perusahaan yang terdaftar pada Perjanjian Kerjasama	Jumlah Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 persen	5 Perusahaan	40 Perusahaan	DAU
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	Persentase perusahaan yang memenuhi sarana Hubungan	Jumlah perusahaan yang dilakukan pendataan dan Informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial	Jumlah Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 persen	30 Perusahaan	40 Perusahaan	DAU



Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022

Tenaga Kerja	Industrial	tenaga kerja		Kelurahan				
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota								
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang memenuhi sarana Hubungan Industrial	Jumlah Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan	Jumlah kasus perselisihan Hubungan Industrial yang terselesaikan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 persen	0 perusahaan	15 kasus	0.00 DAU
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang memenuhi sarana Hubungan Industrial	Jumlah kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan	Jumlah kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 persen	15 kasus	15 kasus	50,000,000.00 DAU



Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022

Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	Persentase perusahaan yang memenuhi sarana Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Terverifikasi dan terekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha	Jumlah kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselamatkan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 persen	0 Perusahaan	15 kasus	0.00	DAU
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang memenuhi sarana Hubungan Industrial	Jumlah Lembaga Kerjasama Tripartit yang terbentuk dan dibangun	Jumlah kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselamatkan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 persen	1 Lembaga	15 kasus	25,000,000.00	DAU
Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Persentase perusahaan yang memenuhi sarana Hubungan Industrial	Jumlah pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja yang difasilitasi	Jumlah kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselamatkan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 persen	30 Perusahaan	15 kasus	1,000.00	DAU
JUMLAH									4,228,638,311.00



2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaah usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan berdasarkan usulan yang diperoleh dari pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, usulan program pengawasan sebagai berikut :

Tabel T-C.3.2

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kabupaten Pasaman Barat

N O	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pasaman Barat			
	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kab/Kota	Pasaman Barat			
	Pelayanan Antar Kerja	Pasaman Barat	Jumlah Pelayanan Tenaga Kerja Mandiri	2 Paket	
			Jumlah Pelatihan Kewirausahaan	1 Paket	
			Jumlah Pelayanan Teknologi Tepat Guna	1 Paket	
			Jumlah Pelayanan Padat Karya Infrastruktur	-	
2			Jumlah Pelayanan Padat Karya Produktif	-	
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pasaman Barat			
	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Pasaman Barat	Jumlah Pelatihan yang di fasilitasi		
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Pasaman Barat	Jumlah Pelatihan yang di fasilitasi	3 Paket	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, ada terdapat 7 agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang tertuang dalam nawacita pemerintah yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2020-2024, yakni sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Agenda ini menitik beratkan pada peningkatan daya dukung dan kualitas Sumber Daya Ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing ekonomi.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan. Agenda ini menitik beratkan kepada pengguna pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi wilayah.
3. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, yang dititik beratkan pada pemenuhan pelayanan dasar. Misalnya pemerataan pelayanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan akses mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Agenda ini dititik beratkan kepada peningkatan karakter dan budi pekerti yang baik, membangun etos kerja.
5. Memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transportasi pelayanan publik.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Berdasarkan Misi Disnaker Kabupaten Pasaman Barat yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, maka tujuan yang ingin dicapai dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Disnaker Tahun 2022 adalah seperti tertuang pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
Renja Disnaker Tahun 2022

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	NILAI SAKIP	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai SAKIP
			Level Maturitas SPIP
			Nilai WBK - WBBM
			Indeks Kepuasan Masyarakat
Meningkatkan Perluasan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang di tempatkan
		Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi
		Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan
			Besaran Kasus Yang Diselesaikan dengan perjanjian Bersama
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Eks Transmigrasi	Jumlah Jorong ex Transmigrasi yang di fasilitasi Program Pemberdayaan	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat ex Transmigrasi	Jumlah Jorong ex Transmigrasi yang di fasilitasi Program Pemberdayaan



3.3. Program dan Kegiatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, selain menjalankan program rutin, Disnaker Kabupaten Pasaman Barat selaku koordinator bidang pembangunan ketenagakerjaan bertanggung jawab mengkoordinasikan keselarasan program-program pembangunan ketenagakerjaan daerah di seluruh OPD dan para stakeholder. Secara umum, rencana program dan kegiatan Disnaker Pasaman Barat Tahun 2022 tertuang dalam 7 (Tujuh) program yang terdiri dari 21 (Dua Puluh Satu) kegiatan, seperti terlihat pada tabel berikut:



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target
Belanja Operasional				DISNAKER				4,218,638,311.00			13,590,519,668.00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA											
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhiya Kegiatan Penunjang Operasional Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	Persentase Realisasi Keuangan	DISNAKER	100 persen	26 Orang	100 persen	2,598,790,888.00	DAU	Persentase Pelayanaan Penunjang Pemerintah Daerah	26 Orang
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Terpenuhiya Kegiatan Penunjang Operasional Perangkat Daerah	Jumlah Non PNS (PTT/THL) Penunjang Administrasi Perkantoran	Persentase Realisasi Keuangan	DISNAKER	100 persen	14 Orang	100 persen	252,500,000.00	DAU	Persentase Pelayanaan Penunjang Pemerintah Daerah	13 THL, 1 PTT
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Terpenuhiya Kegiatan Penunjang Operasional Perangkat	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	Persentase Realisasi Keuangan	DISNAKER	100 persen	12 Bulan	100 persen	64,920,000.00	DAU	Persentase Pelayanaan Penunjang Pemerintah Daerah	12 Bulan
											71,412,000.00
								2,916,210,888.00			3,814,969,268.00
								3,386,821,161.00			3,814,969,268.00
								4,218,638,311.00			13,590,519,668.00

Dinas Tenaga Kerja Kab. Pasaman Barat



Dinas Tenaga Kerja Kab. Pasaman Barat



Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022

Penyediaan Barang Cukupan dan Penggandaan	Persentase Terpenuhi Kegiatan Penujangan Operasional Perangkat Daerah	Jumlah Barang cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	DISNAKER	100 persen	1 Paket	100 persen	23,513,500	DAU	Persentase Pelayan Penujangan Pemerintah Daerah	1 Paket	9,680,000.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terpenuhi Kegiatan Penujangan Operasional Perangkat Daerah	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah yang diikuti	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	DISNAKER	100 persen	30 Kali	100 persen	86,389,290.00	DAU	Persentase Pelayan Penujangan Pemerintah Daerah	30 Kali	66,235,400.00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintah Daerah												
91,280,000.00												
Pengadaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Persentase Terpenuhi Kegiatan Penujangan Operasional Perangkat Daerah	Tersedianya Sarana Pendukung BLK	Persentase Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 persen	1 Paket	80 persen	91,280,000	DAU	Persentase Pelayan Penujangan Pemerintah Daerah	1 Gedung BLK	2,200,000,000.00
108,702,000.00												
Penyediaan Jasa Penujangan Urusan Pemerintah Daerah												
82,636,495												
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terpenuhi Kegiatan Penujangan Operasional Perangkat Daerah	Jumlah lembar PNS dan Non PNS penunjang urusan kantor	Cakupan Pemenuhan Penyediaan Jasa Pelayan Penujangan Urusan Kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Bulan	80 persen	16,402,000	DAU	Persentase Pelayan Penujangan Pemerintah Daerah	12 Bulan	19,844,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terpenuhi Kegiatan Penujangan Operasional Perangkat Daerah	Jumlah Pembayaran Tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Cakupan Pemenuhan Penyediaan Jasa Pelayan Penujangan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Bulan	80 persen	61,433,495	DAU	Persentase Pelayan Penujangan Pemerintah Daerah	12 Bulan	52,800,000.00



Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022

Daerah	dan Listrik	Urusan Kantor	Kelurahan									
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase Terpenuhi Kegiatan Penunjang Operasional Perangkat Daerah	Jumlah Gedung kantor yang disewa	Cakupan Pemenuhan Penyediaan Jasa Pelayanan Penunjang Urusan Kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Gedung	80 persen	1,000.00	DAU	Persentase Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah	1 Gedung	30,250,000.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terpenuhi Kegiatan Penunjang Operasional Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Cakupan Pemenuhan Penyediaan Jasa Pelayanan Penunjang Urusan Kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	2 Orang	80 persen	4,800.000	DAU	Persentase Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah	2 Orang	5,808,000.00
75,625,000.00												
67,782,800												
Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terpenuhi Kegiatan Penunjang Operasional Perangkat Daerah	1. Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pembayaran pajak dan KIR. 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang Terpelihara	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	4 Unit	21 Unit	33,097,800	DAU	Persentase Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah	1. 3 Unit (1 unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2) dan BBM rutin	40,051,000.00



Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Persentase Terpenuhi nya Kegiatan Penunjang Operasional Perangkat Daerah	1. Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pembayaran pajak dan KIR. 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang Terpelihara	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	2 Unit	21 Unit	24,075,000	DAU	Persentase Pelayan Penunjang Pemerintah Daerah	1. 2 Unit (kendaraan roda 4) 2. 2 Unit (Kendaraan roda dua)	28.314.000,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Persentase Terpenuhi nya Kegiatan Penunjang Operasional Perangkat Daerah	Jumlah alat elektronik penunjang operasional administrasi perkantoran yang dipelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang Terpelihara	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	15 Unit	21 Unit	10,610,000	DAU	Persentase Pelayan Penunjang Pemerintah Daerah	5 Unit komputer, 6 unit printer, 1 unit mesin TIK, 1 unit CCTV, 2 unit AC	7.260.000,00	
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA									50,000,000.00				1,100,000,000.00
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)									50,000,000.00				1,100,000,000.00
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Persentase Rencana Tenaga Kerja Yang Disusun	Jumlah Kegiatan Tenaga Kerja Makro	Jumlah Rencana Tenaga Kerja Yang Disusun	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Dokumen	2 Dokumen	50,000,000.00	DAU	Persentase terlaksananya penyusunan rencana tenaga kerja makro	1 Dokumen	550,000,000.00	
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Persentase Rencana Tenaga Kerja Yang Disusun	Jumlah Kegiatan Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Rencana Tenaga Kerja Yang Disusun	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Dokumen	2 Dokumen	-	DAU	Persentase terlaksananya penyusunan rencana tenaga kerja mikro	1 Dokumen	550,000,000.00	
PROGRAM	PENGEMBANGAN	KAWASAN TRANSMIGRASI						10,000,000.00		110,000,000.00			



Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022

Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian										10,000,000.00		110,000,000.00
Penguatan SDM dalam Rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Persentase jumlah warga transmigrasi yang mendapatkan pelatihan penguatan SDM	Jumlah warga transmigrasi yang diberikan pelatihan penguatan SDM	Jumlah Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kawasan	20 Orang	1 Kawasan			10,000,000.00	DAU	20 Orang 110,000,000.00
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA										490,003,000.00		1,292,500,000.00
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi										430,001,000.00		880,000,000.00
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan kerja dan pembinaan Lembaga pelatihan kerja swasta	Jumlah Pelatihan yang difasilitasi	Jumlah Pelatihan yang difasilitasi	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Paket	3 Paket			430,000,000.00	DAU	275,000,000.00
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase Peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan kerja dan pembinaan Lembaga pelatihan kerja swasta	Terselenggaranya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja berupa penguatan dan pemberdayaan SDC serta	Jumlah pelatihan yang difasilitasi	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Dokumen	3 Paket			1,000.00	DAU	385,000,000.00



Dinas Tenaga Kerja Kab. Pasaman Barat



Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022

Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil									
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah konsultasi produktivitas yang dilakukan pada perusahaan kec	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Konsultasi	6 Konsultasi	6 Konsultasi	1,000.00	88,000,000.00
Pengukuran Produktivitas	Tingkat	Daerah Kabupaten/Kota						35,000,000.00	110,000,000.00
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah dokumen pengukuran produktivitas Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja yang diukur	Jumlah Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja yang diukur	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	35,000,000.00	110,000,000.00
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA									
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota									
Penyediaan Sumber Daya Pelayanaan antar Kerja	Persentase tenaga kerja yang terdaftar dan ditempatkan	Tersedianya Sumber Daya Pelayanaan antar Kerja	Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan Diskor Formal dan Informal	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 persen	12 Bulan	84 Orang	0.00	33,000,000.00
Pelayanaan antar Kerja	Persentase tenaga kerja yang terdaftar dan ditempatkan	Jumlah Pelayanaan AKL, AKAD dan AKA	Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan Diskor Formal dan Informal	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 persen	12 Orang	84 Orang	10,000,000.00	55,000,000.00



Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022

Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Persentase tenaga kerja yang terdaftar dan ditempatkan	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan Disektor Formal dan Informal	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 persen	50 Orang	84 Orang	25,000,000.00	DAU	Persentase tenaga kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	1 SMK (1 Paket)	55,000,000.00
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Persentase tenaga kerja yang terdaftar dan ditempatkan	Jumlah Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan yang Diselenggarakan	Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan Disektor Formal dan Informal	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 persen	2 Orang	84 Orang	1,000.00	DAU	Persentase layanan disabilitas yang diselenggarakan	1 Paket	11,000,000.00
Perluasan kesempatan kerja	Persentase tenaga kerja yang terdaftar dan ditempatkan	Jumlah Pelayanan TKM, TTG, Pelayanan Padat Karya Infrastruktur, Pelayanan Padat Karya Produktif	Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan Disektor Formal dan Informal	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 persen	1 Paket	84 Orang	15,000,000.00	DAU	Persentase perluasan kesempatan kerja	3 Paket	330,000,000.00
Penerbitan Izin Lembaga Pencematan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota												
Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Persentase Jumlah Perizinan LPTKS yang terintegrasi dan pengawasan Pengendalian LPTKS	Jumlah Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah LPTKS yang mendapatkan Perizinan yang Terintegrasi dan Pengawasan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	0 LPK	0 LPK	0.00	DAU	Persentase perizinan LPTKS yang disediakan	14 LPK	22,000,000.00
Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Persentase pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	0 LPK	0 LPK	0.00	DAU	Persentase pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan	14 LPK	22,000,000.00



Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022

Pengelolaan Informasi Pasar Kerja										60,000,000.00	352,000,000.00		
Penelitian dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Persentase Tenaga Kerja yang terdaftar dan ditempatkan	Jumlah Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online yang Terpelihara	Jumlah Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online yang Terpelihara	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 persen	1 Aplikasi	1 Aplikasi	DAU	Persentase aplikasi informasi pasar kerja yang terpelihara	1 Aplikasi	110,000,000.00		
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Persentase Tenaga Kerja yang terdaftar dan ditempatkan	Jumlah laporan pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	Jumlah Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online yang Terpelihara	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 persen	12 Dokumen	1 Aplikasi	DAU	Persentase laporan pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	12 Dokumen	110,000,000.00		
Job Fair/Bursa Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang terdaftar dan ditempatkan	Jumlah Bursa Kerja yang Dilaksanakan	Jumlah Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online yang Terpelihara	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 persen	2 Paket	1 Aplikasi	DAU	Persentase bursa kerja yang dilaksanakan	2 Paket	132,000,000.00		
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota										50,000,000.00	352,000,000.00		
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Persentase perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan)	Jumlah Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terampil pada bidangnya	Jumlah Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terampil pada bidangnya	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	10 Orang	10 Orang	50,000,000.00	Persentase perlindungan dan kompetensi calon pekerja migran	20 Orang	220,000,000.00		
Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Persentase perlindungan PMI (Pra dan Purna)	Jumlah Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran yang	Jumlah Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran yang	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	0 Paket	10 Orang	0.00	Persentase tersedianya layanan terpadu pada calon	1 Paket	22,000,000.00		



Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022

Pemempatan)	tersedia	Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terampil pada bidangnya	Semua Kelurahan	100 persen	0 Orang	10 Orang	0,00	DAU	Persentase pekerja migran Indonesia yang melakukan pemberdayaan		
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Pekerja Migran Indonesia yang melakukan Pemberdayaan Purna Penempatan	Jumlah Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terampil pada bidangnya	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	0 Orang	10 Orang	0,00	DAU		10 Orang	110.000.000,00
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL											
Pengembangan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											
Pengembangan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Persentase perusahaan yang memenuhi sarana Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang melakukan pengesahan Peraturan Perusahaan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 persen	5 Perusahaan	40 Perusahaan	12.152.750,00	DAU	Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan	5 Perusahaan	110.000.000,00
Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Persentase perusahaan yang memenuhi sarana Hubungan Industrial	Jumlah perusahaan yang terdaftar pada Pendaftaran Perjanjian Kerjasama	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 persen	5 Perusahaan	40 Perusahaan	9.659.400,00	DAU	Jumlah perjanjian kerjasama yang didaftarkan	5 Perusahaan	110.000.000,00



Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022

Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang memenuhi sarana Hubungan Industrial	Jumlah perusahaan yang dilakukan pendataan dan Informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja	Jumlah Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 persen	30 Perusahaan	40 Perusahaan	35,000,000.00	DAU	jumlah pendataan, informasi dan jaminan sosial	30 Perusahaan	275,000,000.00
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota												
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang memenuhi sarana Hubungan Industrial	Jumlah Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan	Jumlah kasus perselisihan Hubungan Industrial yang terselesaikan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 persen	0 perusahaan	15 kasus	0.00	DAU	Persentase Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan serta pencegahan dan penanganan pekerja anak yang di fasilitasi	50 perusahaan	55,000,000.00
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang memenuhi sarana Hubungan Industrial	Jumlah kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan	Jumlah kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 persen	15 kasus	15 kasus	50,000,000.00	DAU	Persentase perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang di selesaikan	15 kasus	110,000,000.00



Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022

Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	Persentase perusahaan yang memenuhi sarana Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Terverifikasi dan terekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha	Jumlah kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang terselesaikan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 persen	0 Perusahaan	15 kasus	DAU	Persentase verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan perusahaan yang diselenggarakan	24 Perusahaan	110.000.000.00
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang memenuhi sarana Hubungan Industrial	Jumlah Lembaga Kerjasama Tripartit yang terbentuk dan dibina	Jumlah kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang terselesaikan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 persen	1 Lembaga	15 kasus	DAU	Persentase lembaga kerjasama tripartit yang dilaksanakan	1 Lembaga	55.000.000.00
Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Persentase perusahaan yang memenuhi sarana Hubungan Industrial	Jumlah pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja yang difasilitasi	Jumlah kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang terselesaikan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 persen	30 Perusahaan	15 kasus	DAU	Persentase pelaksanaan jaminan sosial yang difasilitasi		55.000.000.00
JUMLAH											13.590.519.668.00
											4.228.638.311.00



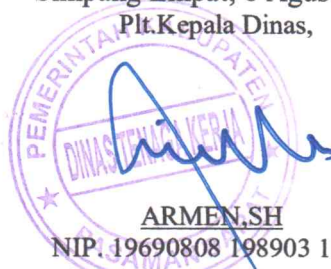
BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Disnaker Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun 2022. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja akan sangat bergantung kepada komitmen dan kerjasama semua pihak yang terkait. Diperlukan sinergitas antar semua pihak dalam pencapaian tujuan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Penyusunan Renja sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan perumusan rencana program untuk pembangunan 1 tahun kedepan. Selain sebagai kontrol terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, juga menjadi pedoman dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan OPD pada akhir tahun anggaran. Dengan demikian, harapan terhadap pembangunan yang lebih terarah, terintegrasi dan sinergis untuk mencapai hasil yang lebih baik dapat diwujudkan.

Simpang Empat, 6 Agustus 2021
Plt.Kepala Dinas,



ARMEN,SH
NIP. 19690808 198903 1 002